


**PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI DAN SOSIAL KELOMPOK MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN KETAHANAN SOSIAL**

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 01(2) (2019): 134-151

© Saru Arifin, Rahayu F. A., Laga Sugiarto, Riska Alkadri  
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Saru Arifin, Rahayu Fery Anitasari, Laga Sugiarto, Riska Alkadri**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 29 Januari 2019, Diterima: 2 Februari 2019, Dipublikasi: 5 Maret 2019

**Abstrak**

Fokus kegiatan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan (*transfer of knowledge*) mengenai bagaimana masyarakat sasaran dalam hal ini kelompok masyarakat (RT, karangtaruna, PKK dan Dawis) di lingkungan Ampelgading Timur II, Kalisegoro, mampu menggali dan mengkreasikan potensi sumberdaya ekonomi yang dimilikinya, sehingga bisa memiliki nilai tambah secara ekonomis. Selain itu, perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terjadi pada masyarakat sasaran, menyebabkan mereka pada fase masyarakat transisi menuju masyarakat urban atau perkotaan. Pengabdian ini menggunakan dua pendekatan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat, yakni membuka wawasan (*transfer of knowledge*) tentang bagaimana membaca peluang ekonomi yang dimiliki dan sekaligus bagaimana melakukan adaptasi atas perubahan sosial yang terjadi dewasa ini. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa masyarakat sasaran memiliki potensi ekonomi agraris yang berasal dari perkebunan yang mereka miliki berupa buah-buahan dan sayuran yang selama ini dijual secara tradisional baik di tempat maupun ke pasar-pasar tradisional di perkotaan. Hanya saja kemampuan untuk 'presentasi dagangan' masih bersifat tradisional juga, belum bisa melakukannya secara modern yang bernilai jual yang selevel dengan yang ada di pasar ritel modern. Selain itu, dari sisi Sumber Daya Manusia, masyarakat sasaran memiliki banyak remaja lulusan Sekolah Menengah yang masih menganggur dan tidak bisa menyalurkan bakat atau potensi yang dimilikinya. Model jualan produk perkebunan yang secara turun-temurun dilakukan oleh orang tua mereka, tidak cukup menarik bagi mereka untuk meneruskannya, karena tidak menarik, identik dengan murah dan perlu tenaga yang memadai. Berdasarkan temuan ini, maka perlu dilakukan pengabdian lanjutan mengenai teknis pengembangan pemasaran, pengemasan dagangan dan pengembangan interes masyarakat

---

**Korespondensi Penulis**

Fakultas Hukum UNNES, Sekaran,  
Gunungpati, Semarang, 50229

**Surel**

[saruarifin@mail.unnes.ac.id](mailto:saruarifin@mail.unnes.ac.id)

---

sasaran secara rill melalui metode workshop.

**Kata kunci:**

Kapasitas Ekonomi, Kapasitas Sosial, Nilai Ekonomis, Tradisional, Modern

**PENDAHULUAN**

Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan saat ini berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kelurahan/desa ketimbang sebagai penyerap aspirasi masyarakat, sehingga dirasa Lembaga Kemasyarakatan hanya dirasa sebagai *Event Organizer* yang dimiliki kelurahan. Perubahan paradigma terhadap Lembaga Kemasyarakatan sebagai sumber dukungan yang efektif bagi penyelesaian berbagai agenda dan masalah pembangunan, bukan hanya sebagai organisasi masa yang membebani anggaran. Peran pemimpin di aras lokal sangat menentukan arah pembangunan yang ada: (1) apakah akan mendinamisasi dan menggerakkan potensi atautkah (2) sebagai beban anggaran negara (Maharjan, 2017).

Aspek regulasi kehadiran Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa berdampak terhadap Lembaga kemasyarakatan di desa yang berbeda dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Sehingga perlu adanya

penyelarasan dengan dikeluarkannya Kebijakan daerah yang menjadi penyelarah antara dua lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa maupun yang ada di kelurahan. Konsepsi tentang perlunya Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kelurahan melihat karena kondisi masyarakat perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan dan mobilitas tinggi, cenderung bersifat individualis dan menarik diri dari kehidupan masyarakat, serta berkurangnya komitmen terhadap kelompok masyarakat yang lebih luas berakibat pada komunikasi yang tidak efektif dimana individu cenderung bersikap 'semau gua' dan pada akhirnya mengakibatkan putusnya komunikasi di lingkungan terdekat. Sehingga memerlukan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk sebagai bentuk pengkoordinasian antara masyarakat dengan anggapan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam pembangunan, tapi memerlukan masyarakat sipil dan *private sectore*.

Meskipun secara struktural tidak menjadi bagian dari pemerintah, peran

organisasi akar rumput dapat menyatu  
dengan tugas pokok pemerintahan di

suatu daerah (Warren dan Visser, 2016). Pembentukan kelompok atau organisasi pada tingkat akar rumput (*Grassroot Organization*) merupakan sarana untuk mengorganisasi kepentingan kolektif untuk maju dan sejahtera bersama.

Realisasi Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan dalam mendukung proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi yang sama seperti pemerintah desa, didalam susunan pemerintah kelurahan memiliki Lembaga Kemasyarakatan juga yang memiliki fungsi yang hampir sama untuk menjalankan fungsi administrative dan fungsi pengembangan masyarakat. Adapun Lembaga kemasyaraktan yang terbentuk adalah Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RT dan RW), Karangtaruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Terkait dengan dinamika dan peran kelompok-kelompok masyarakat tersebut, secara empiris Kelompok Masyarakat di wilayah Ampelgading, Kelurahan Kalisegoro, memiliki aktivitas perekonomian yang berbasis dari perkebunan, utamanya buah-buahan, dan sebagiannya lagi sebagai

penjual asongan. Kegiatan perekonomian tersebut berjalan secara tradisional dengan teknis perdagangan tradisional. Padahal, hasil perkebunan yang didapatkan cukup melimpah tatkala musim panen tiba dari setiap hasil perkebunan yang mereka miliki, seperti durian, pisang, rambutan, alpokat dan sayura-mayur.

Kondisi tersebut di atas, jika tidak diarahkan dengan baik, maka akan berakibat pada terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan rumah tangga baik yang menyangkut sandang, pangan dan papan, terutama 'gaya hidup urban' yang bersifat konsumtif, seperti telekomunikasi, transportasi, pakaian dan sekolah anak-anak mereka.

Pada sisi lain, sebagai kelompok masyarakat urban-baru, dalam arti masyarakat yang bertransformasi dari 'perkampungan' ke perkotaan, akibat kemajuan yang picu oleh banyaknya pendatang di lingkungan masyarakat asli ampelgading, menyebabkan terjadinya perubahan budaya dan perilaku, sehingga hal ini berimplikasi terhadap tumbuhnya gaya hidup perkotaan dengan berbagai dampak sosialnya, terutama bagi kalangan remaja (Koenjaraningrat, 1980). Pada

generasi muda misalnya, menurut Soerjono Soekanto (1996:414), dalam situasi masyarakat yang mengalami masa transisi perubahan, generasi muda seolah-olah terjepit antara norma-norma lama dengan norma-norma baru (yang kadang-kadang belum terbentuk), sehingga menyebabkan terjadinya jarak antargenerasi yang mengakibatkan terjadinya konflik.

Pada konteks sosial tersebut, masyarakat di wilayah Ampelgading sangat rentan terpengaruh budaya perkotaan, baik melalui ‘masyarakat pendatang’ maupun media sosial yang menebarkan banyak informasi-informasi produk kapitalisme-global, seperti belanja online, pertemanan, maupun postingan informasi. Oleh sebab itu, diperlukan pengetahuan yang benar bagaimana cara bijak memanfaatkan media sosial maupun internet—yang produktif dan bernilai tambah dalam konteks penguatan potensi ekonomi maupun ketahanan sosial masyarakat di wilayah Ampelgading.

Terkait dengan hal itu, pemberdayaan masyarakat bisa disimpulkan jadi satu sistem membuat manusia atau sekumpulan orang

melalui langkah pengembangan kekuatan masyarakat, perubahan tingkah laku masyarakat, serta pengorganisasian masyarakat (Astrid, 2017). Dalam konteks itu, maka pengabdian ini akan berupaya membuka cakrawala pemikiran masyarakat sasaran akan terjadinya perubahan sosial-masyarakat yang begitu cepat, serta bagaimana mengembangkan sumberdaya alam yang dimiliki, sehingga bisa dikreasi untuk mendapatkan nilai tambah secara ekonomis.

## LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan adalah terbentuknya pemberdayaan masyarakat melalui aspek historis lembaga kemasyarakatan dan dinamika sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sasaran pengabdian masyarakat atau kelompok kemasyarakatan di wilayah Ampelgading Timur II Kalisegoro, Gunungpati.

## METODE PELAKSANAAN

Ada dua fokus yang dilaksanakan dalam pengabdian ini, yakni penguatan kapasitas bina ekonomi dan bina sosial kelompok masyarakat di wilayah Ampelgading

Timur, Kelurahan Kalisegoro. Pada aspek bina ekonomi, akan dilakukan 'pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat', seperti bagaimana mengaktualisasikan sumber-sumber perekonomian yang mereka miliki, teknis pengolahan maupun pemasarannya, baik secara konvensional maupun berbasis digital. Dalam konteks ini, tim pengabdian akan mengundang narasumber yang relevan dengan bidang UMKM.

Sementara itu, terkait dengan upaya pemberdayaan sosial, tim pengabdian akan melakukan paparan terkait dengan penggunaan media sosial maupun internet yang produktif dan bisa meningkatkan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, secara praktis sasaran pengabdian ini mengacu kepada empat dari sembilan tujuan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013), sebagai berikut. *Pertama*, perbaikan pendidikan (*better education*). Dalam konteks ini pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki pengetahuan masyarakat sasaran supaya tumbuh kesadaran tentang dinamika dan perkembangan sosial masyarakat, serta bagaimana

memanfaatkan sumberdaya ekonomi yang bisa dikreasikan menjadi produk UMKM yang memiliki nilai marketable, sehingga membawa dampak ekonomi.

*Kedua*, perbaikan tindakan (*better action*), dengan berbekal perbaikan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, maka diharapkan timbul tindakan-tindakan yang positif di kalangan masyarakat sasaran untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan Sumberdaya ekonomi yang dimiliki untuk lebih meningkat menjadi produk UMKM, serta sekaligus menopang ketahanan sosial masyarakat.

*Ketiga*, perbaikan masyarakat (*better community*), yakni terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan kesadaran tinggi terhadap UMKM maupun usaha pertanian yang sebetulnya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, sehingga tidak lagi tertarik untuk menjadi buruh ataupun TKI keluar negeri.

Kerangka pikir pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat sasaran, yakni kelompok masyarakat di Ampelgading Timur II Kalisegoro yang terdiri dari RT, Karangtaruna,

PKK dan dasa wisma dilakukan melalui beberapa kegiatan. Tahap pertama, tim pengabdian melakukan identifikasi terhadap pemahaman dan pengalaman masyarakat sasaran mengenai masalah-masalah perekonomian yang mereka hadapi. Tahap ini tim peneliti melakukan wawancara dan/atau diskusi dengan menyajikan sejumlah pertanyaan terkait. Selanjutnya, tim pengabdian melakukan sosialisasi, melalui metode ceramah dan diskusi (Mardikanto dan Soebiato, 2013). Tahap berikutnya tim pengabdian akan kembali melakukan proses tanya-jawab kepada masyarakat sasaran yang hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya untuk mengetahui perbedaan respon yang mereka berikan antara sebelum dan sesudah diadakannya pengabdian. Berdasarkan hal ini diharapkan akan ada perubahan sikap dari masyarakat sasaran dalam memahami situasi dan kondisi sosial dan ekonomi yang mereka hadapi serta nilai-nilai positif dari UMKM yang dapat mereka bentuk, baik menyangkut peluang dan tantangannya.

Metode yang digunakan oleh tim pengabdian mencakup dua metode

sekaligus sebagai berikut (Mardikanto dan Soebiato, 2013):

1. Metode ceramah, dalam hal ini tim pengabdian menyampaikan materi kepada masyarakat sasaran mengenai topik pengabdian.
2. Diskusi dan sharing secara timbal balik antara masyarakat sasaran dengan tim pengabdian.

Adapun evaluasi yang digunakan oleh tim pengabdian adalah model CIPP (*Contexts, Input, Process, and Product*) yang digagas oleh Tayipnafis (2008) sebagaimana dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato (2013). Penjelasan dari metode evaluasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi *Contexts*, berkaitan dengan beberapa faktor dan kondisi sebelum dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yakni tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. Evaluasi *Input*, adalah evaluasi terkait dengan masukan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat sasaran;
  - c. Evaluasi *Process*, yakni terkait dengan pelaksanaan program pengabdian dari awal sampai akhir;
- Evaluasi *Product*, yakni terkait dengan kualitas hasil kegiatan yang

dicapai berdasarkan feedback dari masyarakat sasaran.

## HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Lembaga Kemasyarakatan

Secara historis munculnya Lembaga Kemasyarakatan yang ada dikelurahan/desa sudah terjadi sejak lama. Catatan sejarah mengatakan bahwa RT dan RW saja sudah dibentuk mulai masa penjajahan Jepang, RT/RW pada masa itu menjadi alat kontrol politik militer Jepang terhadap masyarakat Indonesia sehingga lebih mudah untuk mengawasinnnya. Hingga sampai pada sultan Hamengku Buwono IX dan disebarluaskan keseluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini RT dan RW tetap menjadi alat pengatur pemerintah di tingkat *grassroot* yang menjadi garda terdepan yang dimiliki oleh pemerintah ditingkat yang paling bawah. Walaupun demikian terkadang RT dan RW sendiri tidak didukung dengan kemampuan Managerial yang mencukupi sehingga terkesan hanya sebagai pelengkap dan sebagai alat penyampai komunikasi saja dari pemerintah kelurahan ke Masyarakat saja.

Kedua lembaga kemasyarakatan yang ada ditingkat kelurahan saat ini adalah Karang Taruna. Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1960 di Kampung Melayu Jakarta, melalui proses *Experimental Project* Karang Taruna, kerjasama masyarakat Kampung Melayu dan Yayasan Perawatan Anak Yatim (YPAY) dengan Jawatan Pekerjaan Sosial Departemen Sosial. Pembentukan Karang Taruna dilatar belakangi oleh banyaknya anak-anak yang menyandang masalah sosial antara lain seperti anak yatim, putus sekolah, mencari nafkah membantu orang tua dan sebagainya. Masalah tersebut tidak terlepas dari kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat kala itu terutama dalam masyarakat perkotaan yang notabennya tinggal di kawasan kelurahan (Antlov, 2000). Sehingga dari *Experimental Project* yang dilakukan oleh pemerintah inilah lalu di sebarluaskan ke daerah-daerah lain sehingga menjadi salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang ada di tingkat desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Ketiga Lembaga Kemasyarakatan yang cukup besar juga yang mampu bergerak dengan massif adalah Pembinaan



Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar *Home Economic* di Bogor tahun 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada tahun 1961 Panitia Penyusunan Tata Susunan Pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Pendidikan bersama Kementerian-kementerian lainnya menyusun 10 Segi Kehidupan Keluarga. Gerakan PKK dimasyarakatkan berawal dari kepedulian isteri Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967 (ibu Isriati Moenadi) setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar pada masa itu, sehingga perlu di bentuk lembaga Kemasyarakatan ini sebagai antithesis dari fenomena social yang muncul di masyarakat dengan harapan Lembaga Kemasyarakatan ini mampu memberikan bimbingan pada keluarga agar bias hidup sehat dan memikirkan kebutuhan gizi keluarganya.

Ditinjau dari aspek politik, Rukun Warga dan Rukun Tangga memiliki fungsi sebagai pen jembatan antara warga dengan pemerintah daerah, lembaga ini merupakan bagian

dari pelayanan pemerintah daerah, sebagai alat penyerap aspirasi masyarakat, menjadi media pendidikan politik bagi masyarakat sehingga bisa meningkatkan paetisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan, serta sebagai pemelopor kegiatan yang ada ditingkat RT/RW. Karang Taruna ditinjau dari aspek politiknya memiliki fungsi sebagai wadah penyalur pendidikan politik bagi kalangan muda dan harus bersih dari hal-hal politik praktis, sehingga karangtaruna bisa menjadi penggerak kepedulian sosial di masyarakat. Terakhir PKK memiliki fungsi sebagai pendidikan politik juga akan tetapi lebih spesifik menyasar pada perempuan terutama yang sudah berkeluarga. Sehingga bisa sebagai wadah untuk menyuarkan pendapat perempuan terkait dengan politik.

Golongan muda yang terwakili dalam lembaga Karang Taruna juga menjadi wadah partisipasi aktif masyarakat terkhusus adalah anak-anak muda yang ada di desa/kelurahan untuk ikut aktif dalam perumusan kebijakan yang ada di desa/kelurahan (Nugroho, 2010). Bukan ditingkat perumusan saja peran Karangtaruna juga sebenarnya mampu

menjadi penggerak sosial dalam proses pembangunan yang ada didesa/kelurahan karena mereka memiliki pengaruh yang cukup besar dikangan anak muda.

Aspek sosial budaya yang dimiliki Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagai Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai bentuk pelayanan masyarakat desa dan kelurahan, untuk memelihara kerukunan warga, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai serta norma-norma kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, serta sebagai penghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di wilayahnya. Aspek sosial budaya yang dimiliki Karang Taruna adalah sebagai penanggulangan berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat preventif dan rehabilitatif. Sehingga kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan dapat meningkat. Sedangkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga memiliki aspek sosial budaya yang terkenal

dengan gagasan 10 program PKK yang meliputi Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Ketrampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat. Dari 10 program PKK ini lah diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat di sekitarnya, terutama perempuan, baik yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga.

Berdasarkan paparan yang sudah disampaikan di atas, dapat dilihat bahwa aspek sosial budaya dan politik menjadi sebuah instrument dalam peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, setiap lembaga masyarakat memiliki peran dan konsentrasi terhadap objeknya masing-masing. Seperti PKK, lembaga ini lebih banyak anggotanya adalah perempuan sehingga diharap lembaga ini lebih banyak mendorong perempuan dalam keterlibatan aktif dalam proses perumusan kebijakan yang akan melahirkan rencana pembangunan didesa/kelurahan yang pada akhirnya akan membawa

kesejahteraan kepada kaum perempuan terutama ibu-ibu (Sullivan, 1991).

Kondisi ini dirasa cukup mewakili golongan perempuan dalam proses perumusan kebijakan di tingkat desa/kelurahan. Lembaga Kesejahteraan Keluarga diatur melalui Perpres No. 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bahwa Kegiatan PKK dimulai dari perencanaan hingga pelaporan dengan rencana induk yang disusun tiap 5 tahun sekali. Gerakan PKK merupakan koordinasi menteri, gubernur hingga kades/lurah sehingga alur koordinasi ini yang panjang ini sebenarnya menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah terhadap lembaga kemasyarakatan ini. Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat termasuk lembaga kemasyarakatan yang menangani pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan lembaga lainnya secara *bottom up* (Pasal 17).

Bagian tak kalah pentingnya juga Lembaga RT/RW menjadi instrumen pembangunan yang paling memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap proses pembangunan yang

ada didesa/kelurahan karena lembaga ini yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan bahkan tidak ada batas antara Ketua RT/RW dengan masyarakatnya di sinilah menjadi ujung tombak pembangunan karena kepemimpinan ketua RT/RW yang sudah memiliki trust yang kuat ditengah-tengah masyarakatnya. Sehingga fungsi akomodatif dan pengarahan terhadap masyarakat lebih mudah. Kepemimpinan Ketua RT/RW dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan dalam kemasyarakatan sangatlah diperlukan supaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama. Pengaturan tugas, fungsi, dan kewajiban serta aturan pendanaan lembaga kemasyarakatan jenis Rukun Tetangga (RT) dapat dilihat dalam Permendagri 5/2007 tentang Pedoman Penataan lembaga Kemasyarakatan. Terkait pendanaan RT/RW pendanaan Lembaga Kemasyarakatan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Kondisi ini ketika UU Desa disahkan, menyebabkan kecemburuan sosial

antara penduduk desa dan kelurahan, dikarenakan adanya perbedaan kebijakan insentif pendanaan dari pemerintah.

## **2. Dinamika Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat Sasaran**

### **a. Transisi Masyarakat Sasaran**

Masyarakat sasaran pengabdian ini merupakan tipikal masyarakat transisi dari desa ke kota. Menurut Selo Sumarjan (1995), pengertian masyarakat transisi ialah masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Misalnya masyarakat pedesaan yang mengalami transisi ke arah kebiasaan kota, yaitu pergeseran tenaga kerja dari pertanian, dan mulai masuk ke sektor industri. Berdasarkan penuturan ketua Kelompok Masyarakat Ampelgading Timur, Suyono, dalam decade tahun 2010 ke belakang, banyak masyarakat di wilayah tersebut yang penghidupannya digantungkan kepada hasil alam, khususnya perkebunan sayuran, palawija dan buah-buahan. Namun, seiring dengan banyaknya masyarakat pendatang yang masuk ke wilayah Ampelgading khususnya dan Kalisegoro pada umumnya—dengan membeli tanah-tanah pekarangan

mereka untuk kebutuhan tempat tinggal, situasi sudah mulai berubah. Pada awalnya ketika memiliki cukup banyak uang dari hasil penjualan tanah-tanah pekarangan mereka, pemanfaatannya sebagian dialokasikan untuk membuka usaha perdagangan kelontong, membeli kendaraan untuk kegiatan niaga, sebagian ada yang digunakan untuk mendaftar kerja sebagai buruh migran, dan sebagian lagi untuk konsumsi.

Ketika lahan pekarangan menyusut secara drastis, maka pola tenaga kerja di kalangan masyarakat sasaran secara perlahan berubah ke model perkotaan. Hal ini ditandai dengan banyaknya anak-anak di wilayah Ampelgading Timur yang bekerja di sector industry atau pabrik istilah mereka sebagai karyawan (buruh), seperti di garmen, pabrik baja dan sebagian di koperasi. Sementara kelompok 'tua' masih sebagian bertahan mengolah sisa pekarang yang dimiliki untuk sayuran dan buah-buahan yang hasilnya di jual ke pasar-pasar tradisional di Kota Semarang setiap pagi buta—dengan menyewa angkot Bersama-sama dengan pedagang sayuran lainnya.

Sementara itu, hubungan kelompok masyarakat transisi terhadap kelompok masyarakat lain memiliki pola yang tidak pasti. Banyak masyarakat transisi yang masih mengedepankan kehidupan sosial yang lama, yakni sesuai dengan hubungan kelompok masyarakat desa, namun banyak juga masyarakat transisi yang sudah mulai meninggalkan pola hubungan masyarakat desa dan berpindah pada pola hubungan masyarakat perkotaan. Dalam konteks ini, masyarakat sasaran sejauh ini menurut Suyono, masih tetap mempertahankan beragam tradisi dan adat istiadat mereka, terutama dalam konteks sosial-keagamaan, seperti ‘dekahan’, nyadran, haul leluhur atau kerabat yang meninggal—yang umumnya miriup dengan tradisi yang dikembangkan dalam masyarakat Nahdhatul Ulama (NU). Pergeseran yang mencolok terjadi adalah, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai media komunikasi dalam kegiatan-kegiatan formal di kampung seperti pengajian, rapat-rapat RT/RW, media sosial Whatsap, khutbah jumat dan lain sebagainya.

Dalam konteks pola hubungan masyarakat sasaran ditentukan oleh nilai, adat, kebiasaan, serta budaya tertentu, seperti nilai gotong royong, nilai saling mengenal, budaya berinteraksi, kebiasaan menunggu, kebiasaan saling bergantung, adat ritual, dan sebagainya. Dalam sisi tertentu, pergeseran masyarakat sasaran ke arah transisi ke masyarakat urban—yang umumnya memiliki hubungan sosial yang mengadopsi dari kota dan desa yakni suka menerobos, mudah tersinggung, nostalgia, kurang memperhatikan adat dalam bergaul, sikap individual mulai menonjol, dalam mencapai tujuan bersama kurang menjunjung etika gotong royong, rasa saling membutuhkan satu sama lain mulai memudar dan mereka mulai kehilangan nilai dan norma yang asli. Situasi ini tidak banyak terjadi di lingkungan masyarakat sasaran, karena media ‘penjaga’ keluhuran tradisi masih terus di pelihara melalui berbagai acara kemasyarakatan baik di kalangan remaja, RT, RW, Dawis, Arisan maupun pengajian-pengajian yang rutin diselenggarakan setiap minggunya.

## **b. Pengaruh Media Sosial terhadap Masyarakat Sasaran**

Pesatnya perkembangan teknologi internet yang beririsan dengan perkembangan teknologi, seperti *smartphone* berpengaruh signifikan terhadap masyarakat sasaran, baik dari kalangan anak-anak maupun orang tua. Namun demikian, kehadiran media sosial misalnya, sejauh ini dimanfaatkan masyarakat sasaran hanya sebatas untuk media komunikasi, *sharing*, dan *posting informasi*. Misalnya, di kalangan masyarakat sasaran, di semua kelompok memiliki *group-group Whatsap* sendiri-sendiri dan ada juga *group* yang bersifat umum, seperti *group RT* maupun *pengajian Jamaah Almuttaqin* sebagai media informasi kegiatan pada *group-group* tersebut.

Sementara itu, pemanfaatan media social untuk kepentingan pengembangan perekonomian atau nilai tambah ekonomi keluarga masih sangat minim. Sebagian ada yang memanfaatkannya untuk *online trading* atau *digital trading*, seperti Andre Irawan yang sudah mulai *binis online* dalam bidang IT dan Ibu Hartatik yang *jualan online* kebutuhan rumah tangga, serta

sebagian diantaranya menjual jasa ojek online, seperti *gojek* atau *grab*.

Upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dilakukan oleh tim pengabdian ini dengan mendatangkan narasumber, Widiyanto Muhammad, pelaku *import online barang-barang China*. Mengawali paparan tersebut, ketua tim pengabdian memberikan pengantar tentang perubahan situasi lapangan pekerjaan dari era tahun-tahun di kehidupan generasi para orang tua yang menjadikan profesi seperti Pegawai Negeri Sipil atau Karyawan Perusahaan BUMN maupun Multinasional dengan gaji dan tunjangan yang besar—sebagai cita-cita pekerjaan. Masyarakat milenial di era digital ini lebih banyak didorong untuk memanfaatkan teknologi dan *smartphone* yang dimiliki untuk memiliki bisnis sendiri dan mandiri tanpa terikat ruang waktu dan tempat.

Menurut Widiyanto, di era sekarang menjalankan bisnis online semakin terbuka lebar untuk siapa saja. Selain itu peluangnya juga bisa dibidang lebih mudah dan murah serta memberikan keuntungan yang besar untuk pelakunya. Dengan bisnis online, berbagai jenis usaha bisa

dijalankan dari menjual produk, jasa, hingga membantu menawarkan produk orang lain sebagai *reseller* atau *dropship* melalui berbagai start up yang ada seperti Tokopedia, OLX dan lain sebagainya.

Menurut Widiyanto, ada banyak keuntungan yang didapat dalam melakukan bisnis online. *Pertama*, modal yang dibutuhkan tidak begitu besar, sebab, modal utama dalam menjalankan bisnis online adalah komputer, laptop atau notebook dan jaringan internet. Hal yang menarik lagi adalah tidak perlu toko atau ruko, gedung dan lain sebagainya yang membutuhkan modal atau biaya yang tidak sedikit. Selain itu, bisnis online bisa dijalankan di dalam kamar pribadi. Bandingkan misalnya, bila anda akan memulai bisnis offline toko baju misalnya anda perlu menyiapkan modal yang tidak sedikit dari sewa tempat, peralatan, belanja barang, promosi. Biaya Operasional hanya untuk internet dan listrik. Karena media yang dipakai hanya internet maka bea operasionalnya juga hanya untuk bea langganan internet dan listrik.

*Kedua*, jam kerja yang fleksibel, sebab bisnis online akan bekerja

selama 24 jam nonstop sekalipun sedang tidur. Hal ini karena yang bekerja bukan orang tapi sistem yang berjalan. Tugas kita adalah memfollow up dari permintaan-permintaan yang sudah diterima oleh sistem atau permintaan dari konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis online maka anda bisa dengan mudah untuk bekerja kapan saja dan dimana saja. Kesibukan bekerja di kantor tidak akan mengganggu bisnis online ini, sebab sistem akan membantu anda untuk mendapatkan uang. Jadi, anda bisa bekerja dengan mudah sekalipun anda memiliki banyak profesi.

*Ketiga*, jangkauan pasar yang luas, sebab dalam menjalankan bisnis online, maka anda bisa mendapatkan konsumen dimana saja bahkan di luar pulau pun juga bisa didapatkan. Dengan fasilitas koneksi internet, anda bisa memasarkan produk dengan jangkauan yang sangat luas, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Tetapi dengan kemudahan tersebut kita tidak harus membayar biaya-biaya yang sangat mahal karena semua itu bisa kita lakukan dengan gratis.

*Keempat*, pelayanan mudah dan cepat bagi konsumen. Sebab, mereka

bisa mau membayar, tinggal transfer saja, mau menerima barang tinggal menunggu dirumah saja sampai kirimannya sampai dan layanan yang lainnya. Dengan pelayanan yang cepat tersebut maka siapa saja bisa menjalankan bisnis online, bila ingin transfer dengan mudah dan kapan saja, tinggal menggunakan internet banking atau sms banking.

*Kelima*, tidak butuh tempat atau toko konvensional, sebab bisnis online bisa dilakukan dari meja komputer dirumah, sehingga tidak memerlukan tempat khusus sebagaimana halnya toko-toko konvensional—yang semakin strategis semakin mahal harga sewanya. Apalagi jika lokasi tersebut di perkotaan, maka tidak hanya persoalan sewa yang menjadi beban, tetapi masalah pajak juga menjadi tanggungan yang harus dipertimbangkan secara matang ketika akan memulai bisnis.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah Ampelgading Timur II, Kalisegoro, Gunungpati, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, masyarakat sasaran sebagai kelompok masyarakat transisi

dari perdesaan ke perkotaan, akibat adanya akulturasi dengan masyarakat pendatang, telah merubah pola-pola ketenagakerjaan dari pertanian ke industry, sehingga hal ini menjadi *trend* baru dalam menyokong perekonomian keluarga mereka. Kedua, hadirnya digital bisnis yang saat ini mewabah di masyarakat, menjadi peluang yang strategis untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sasaran khususnya dalam mengembangkan nilai tambah ekonomi keluarga mereka, baik dengan melakukan bisnis secara mandiri maupun mengkreasikan hasil alam yang mereka miliki di lingkungan perkebunan yang masih tersisa.

Berpijak dari temuan tersebut, maka hal yang penting untuk ditindaklanjuti pada pengabdian berikutnya adalah pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat sasaran yang berbasis pertanian perkebunan untuk bias diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi. Sebab, menjual produk mentahan yang selama ini dilakukan tidak banyak menambah pemasukan bagi kebutuhan rumah tangga, selain pendapatan bersifat konstan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. ed., 2014. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Antlov, H. and Eko, S., 2012, March. Village and sub-district functions in decentralized Indonesia. In *Paper to DSFs Closing Workshop*.
- Antlöv, H., 2000, July. Village governance in Indonesia: past, present and future challenges. Dalam *PERCIK Conference "Dynamics of Local Politics in Indonesia,"* Yogyakarta.
- Antlöv, H., Wetterberg, A. and Dharmawan, L., 2016. Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), pp.161-183.
- Aziz, N.L., 2017. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), pp.193-211.
- Dewi Irmawati, Pemanfaat E-Commerce Dalam Dunia Bisnis, *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, Edisi Ke-Vi, November 2011, hlm. 95. Bisa Diakses Melalui Laman [https://Orasibisnis.Files.Wordpress.Com/2012/05/Dewi-Imarwati\\_Pemanfaatan-E-Commerce-Dalam-Dunia-Bisnis.Pdf](https://Orasibisnis.Files.Wordpress.Com/2012/05/Dewi-Imarwati_Pemanfaatan-E-Commerce-Dalam-Dunia-Bisnis.Pdf)
- Harsanto, B.T., Rosyadi, S., Wahyuningrat, W. and Simin, S., 2017. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 30(2), pp.188-196.
- Ito, T., 2016. Everyday Citizenship in Village Java. *Citizenship and Democratization in Southeast Asia*, p.51.
- Jaidan Jauhari, Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-Commerce, *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, Vol. 2, No. 1, April 2010.
- Kemenristekdikti, 2017. *Buku Panduan Inkubasi Bisnis Teknologi*, Jakarta.
- Kusumastuti, A., 2015. Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, pp.81-97.
- Maharjan, K.L., 2017. Rural Community Leadership in Decentralization. In *Decentralization and Rural Development in Indonesia* (pp. 99-110). Springer, Singapore.
- Muluk, Saeful 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan*. The Asia Foundation.
- Nafidah, L.N. and Suryaningtyas, M., 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), pp.214-239.

- Nugroho, Y., 2010. NGOs, the Internet and sustainable rural development: The case of Indonesia. *Information, Communication & Society*, 13(1), pp.88-120.
- Nurcholis, H., 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Grasindo.
- Nuryadin, D. and Suharsih, S., 2017. Analisis dan Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus terhadap Indikator Kinerja Pembangunan di Daerah Studi Kasus Kabupaten-Kota 2003-2013. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), pp.62-70.
- Putri, R.A., Rini, E.F., Rahayu, M.J. and Andini, I., 2017. Kapasitas Sumber Daya Kelurahan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Informasi Geospasial. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 8(2), pp.217-223.
- Salim, A., Bulan, W.R., Untung, B., Laksono, I. and Brock, K., 2017. Indonesia's Village Law: enabler or constraint for more accountable governance?
- Saputra, A.R., 2014. Kinerja Aparatur Pemerintah kelurahan dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota.
- Sobandi, B., 2006. *Desentralisasi dan tuntutan penataan kelembagaan daerah*. Humaniora.
- Soerjono Soekanto, 1996. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sopannah, A., 2012. Ceremonial budgeting: public participation in development planning at an Indonesian local government authority. *Journal of Applied Management Accounting Research*, 10(2), pp.73-84.
- Sujito, A., 2017. *Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Desa (Studi Kolaborasi Para Stakeholder dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa Era Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kebumen)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Sulaiman, A.I., Lubis, D.P., Susanto, D. and Purnaningsih, N., 2015. Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(2), pp.367-378.
- Sullivan, N., 1991. Gender and politics in Indonesia. *Why gender matters in Southeast Asian politics*, (23), pp.61-86.
- Sumarjan, 1999. *Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suparlan, P., 2004. *Masyarakat dan kebudayaan perkotaan: perspektif antropologi perkotaan*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Warren, C. and Visser, L., 2016. The Local Turn: an introductory essay revisiting leadership, elite capture and good governance in Indonesian conservation and development programs. *Human Ecology*, 44(3), pp.277-286.
- Widodo, I., 2017. Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik*

*Indonesia: Indonesian Political  
Science Review*, 2(1), pp.65-85.

Winarno, B., 2015. Agenda Good  
Governance dan Globalisasi  
Ekonomi: Suatu Tinjauan  
Kritis. *Jurnal Hubungan  
Internasional*, 1(2), pp.95-106.

Yuniningsih, T., 2013. Dasar-Dasar  
Pelayanan Instansi Pemerintah  
Menuju Pelayanan Prima:  
Suatu Telaah  
Teoritis. *Dialogue. JIAKP*, 1(1),  
pp.2004-117.

#### Website/Internet

<http://Diskumkm.Jabarprov.Go.Id/Index.Php/News/Ini-8-Poin-Kebijakan-Baru-Untuk-Bisnis-Berbasis-Internet>.

<http://Diskumkm.Jabarprov.Go.Id/Index.Php/News/Ini-8-Poin-Kebijakan-Baru-Untuk-Bisnis-Berbasis-Internet>.

<http://Jateng.Tribunnews.Com/2017/06/02/Provinsi-Jawa-Tengah-Miliki-413-Juta-Umkm>.

<http://Regional.Kompas.Com/Read/2017/09/28/06112041/Lewat-E-Commerce-Produk-Umkm-Jawa-Tengah-Terkenal-Hingga-Amerika>.

<http://Republika.Co.Id/Berita/Ekonomi/Makro/16/08/16/Obz5ti-Pemerintah-Dorong-Umkm-Merambah-Ekonomi-Digital>.

<http://Republika.Co.Id/Berita/Ekonomi/Makro/17/08/06/Ou919x383-Asosiasi-Umkm-Minta-Regulasi-Ecommerce>.

<https://Www.Merdeka.Com/Teknologi/Tokopedia-30-Persen-Merchant-Di-Jawa-Tengah-Dari-Semarang.Html>.